

PERAN RUANG PUBLIK PERKOTAAN DALAM MENDORONG BUDAYA POLITIK INKLUSIF DI KOTA MAKASSAR

*Sriany Ersina¹

¹Prodi Teknik Arsitektur, Lab. Data Desain Perkotaan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia.

^{*)}Email: sriany.ersina@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

Urban public spaces serve as vital social platforms where interactions between diverse groups occur, potentially strengthening an inclusive political culture. This study seeks to find out how the design, management, and utilization of public spaces in Makassar City promotes civic political involvement. The methodology used is qualitative, using a case study approach that includes comprehensive interviews, participatory observations, and documentation analysis. The data was studied using NVivo software to uncover prominent themes arising from socio-political engagement in public locations such as Losari Beach, Karebosi, and Fort Rotterdam. The findings suggest that carefully designed public spaces can act as catalysts for fostering a participatory political culture, despite structural barriers such as inadequate supportive regulations and limited access. The results of this study provide a basis for formulating recommendations aimed at improving democratic and socially fair public space planning.

Keyword: Public Space, Urban, Inclusive Political Culture, Makassar City

ABSTRAK

Ruang publik perkotaan berfungsi sebagai platform sosial vital dimana interaksi antara beragam kelompok terjadi, berpotensi memperkuat budaya politik inklusif. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui bagaimana desain, pengelolaan, dan pemanfaatan ruang publik di Kota Makassar mempromosikan keterlibatan politik sipil. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif, menggunakan pendekatan studi kasus yang mencakup wawancara komprehensif, pengamatan partisipatif, dan analisis dokumentasi. Data diteliti menggunakan perangkat lunak NVivo untuk mengungkap tema-tema menonjol yang timbul dari keterlibatan sosial-politik di lokasi publik seperti Pantai Losari, Karebosi, dan Benteng Rotterdam. Temuan menunjukkan bahwa ruang publik yang dirancang dengan cermat dapat bertindak sebagai katalis untuk menumbuhkan budaya politik partisipatif, terlepas dari adanya hambatan struktural seperti peraturan pendukung yang tidak memadai dan akses yang terbatas. Hasil penelitian ini memberikan dasar untuk merumuskan rekomendasi yang bertujuan meningkatkan perencanaan ruang publik yang aksesibel, demokratis dan adil secara sosial.

Kata kunci: Ruang Publik, Perkotaan, Budaya Politik Inklusif, Kota Makassar.

1. PENDAHULUAN

Ruang publik di kota-kota modern semakin memainkan peran krusial dalam mengaktifkan warga secara politik. Kota Makassar, sebagai salah satu pusat urbanisasi di Indonesia Timur, menyediakan konteks yang kaya untuk mengkaji bagaimana ruang-ruang bersama dapat menjadi wahana pembentukan budaya politik inklusif. Penelitian ini menjawab pertanyaan: sejauh mana ruang publik di kota Makassar mendukung keterlibatan politik masyarakat dari berbagai latar belakang sosial?

Perkembangan ruang publik perkotaan memiliki dampak yang signifikan pada budaya politik masyarakat. Makassar sebagai salah satu pusat perkembangan kota di Indonesia, memberikan perubahan ruang publik yang dapat mempengaruhi pola interaksi sosial dan pandangan politik warganya. Penelitian ini bermaksud untuk menyelidiki bagaimana Peran Ruang Publik Perkotaan dalam Mendorong Budaya Politik Inklusif di Kota Makassar.

Kota Makassar, sebagai salah satu pusat perkembangan di Indonesia, mengalami dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang pesat. Transformasi ini tidak hanya tercermin dalam infrastruktur fisik, tetapi juga dalam karakter budaya dan politik masyarakat. Seiring dengan perkembangan perkotaan, ruang publik di Kota Makassar mengalami perubahan yang signifikan. Dari tradisional hingga modern, ruang-ruang publik menjadi saksi perubahan pola hidup dan interaksi sosial warga.

Ruang publik yang dirancang dengan baik dapat merangsang interaksi sosial dan mempengaruhi budaya politik. Desain kota seharusnya memprioritaskan kebutuhan manusia, menciptakan tempat-tempat di mana orang dapat berkumpul dan berpartisipasi dalam kehidupan kota [1]. Menurut (Carr et al. Menurut Carr (1992), tipologi ruang publik bergantung pada karakteristik aktivitas, lokasi, dan proses pembentukannya. Carr menyebutkan beberapa jenis ruang publik seperti jalanan, taman, jalur hijau, tempat perbelanjaan, ruang spontan di lingkungan hunian, ruang komunitas, plaza, pasar, dan tepi air., Pengelompokkan ruang publik sangat dipengaruhi oleh aktivitas

dominan, lokasi dan bagaimana proses ruang tersebut terbentuk. Carr mengidentifikasi berbagai jenis ruang publik, mulai dari jalan dan taman hingga pasar dan area tepi pantai, menunjukkan keragaman fungsi dan karakteristik ruang publik. Salah satu peran penting taman kota adalah menyediakan ruang untuk ekspresi keberagaman, baik pribadi maupun budaya; Hal ini menimbulkan permasalahan mengenai penyediaan dan akses demokratis terhadap ruang terbuka publik [3].

Perkembangan ruang publik dalam konteks urbanisasi tidak hanya berkaitan dengan fisiknya, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial, politik, dan kultural. Ruang publik perkotaan bukan hanya tempat untuk kegiatan sehari-hari, tetapi juga merupakan arena di mana budaya politik masyarakat tumbuh dan berkembang. Budaya politik, sebagai manifestasi nilai, sikap, dan partisipasi politik masyarakat, dapat tercermin dan dipengaruhi oleh desain, pengelolaan, dan penggunaan ruang publik.

Thomassen dan Lasse 2017 dalam [4] menyatakan bahwa “Keberlangsungan ruang publik, memungkinkan partisipasi masyarakat untuk berkontribusi dan membicarakan segala sesuatu melalui sikap dan tindakan rasional. Lebih lanjut, ruang publik memperoleh signifikansinya ketika dirinya menjadi basis dari kebijakan publik dan partisipasi masyarakat. Bahwa kebijakan publik harus berdasar pada kehendak rasional yang muncul dan muncul dalam diskursus argumentatif dalam ruang publik”.

Dalam perspektif [5], klasifikasi kepentingan masyarakat ada tiga jenis yang didasarkan pada rasionalitas yang berbeda: (1) kepentingan instrumental (kebutuhan untuk menyelesaikan masalah secara praktis), (2) kepentingan intersubjektif (kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain), dan (3) kepentingan dominatif (kebutuhan untuk memiliki pengaruh). Pandangan ini mengindikasikan bahwa struktur kekuasaan dalam masyarakat sangat mempengaruhi cara individu memenuhi ketiga kepentingan tersebut. Konsep ini juga menyoroti hasrat universal manusia untuk mencapai kebebasan dari segala bentuk dominasi.

Kota Makassar memiliki sejumlah ruang publik yang penting, antara lain Pantai Losari, Karebosi, dan Benteng Rotterdam. Pantai Losari; bukan hanya destinasi wisata tetapi juga tempat berkumpulnya masyarakat untuk berbagai aktivitas sosial dan kebudayaan. Karebosi; yang dikenal sebagai alun-alun kota, kerap menjadi pusat kegiatan masyarakat dari berbagai lapisan sosial, mulai dari olahraga hingga acara kebudayaan serta kegiatan kampanye politik dalam proses pemilihan calon presiden, legislatif maupun kepala daerah. Benteng Rotterdam; dengan sejarah kolonialnya, juga berfungsi sebagai ruang terbuka yang kerap digunakan untuk acara seni dan budaya, yang mencerminkan keberagaman dan kekayaan sejarah Makassar. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya ruang publik sebagai tempat bagi masyarakat untuk berkumpul, berdiskusi, dan mengekspresikan pandangan politik mereka. Dengan menyediakan ruang yang inklusif dan mudah diakses, dapat meningkatkan interaksi antar kelompok sosial berbeda, mengurangi ketegangan dan konflik, serta memperkuat solidaritas sosial dan partisipasi politik. Keberadaan ruang publik yang dirancang dengan baik dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat memiliki implikasi penting bagi pembangunan sosial, politik yang berkelanjutan.

Kota Makassar, sebagai kota multi-etnis dengan sejarah panjang, memiliki lapisan-lapisan kultural yang unik. Pergeseran demografi dan pola migrasi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap dinamika budaya politik di kota ini. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perubahan ruang publik dapat membentuk atau mengubah budaya politik masyarakat Makassar. Dalam hal ini **Sejauh mana ruang publik seperti Pantai Losari, Lapangan Karebosi, dan Fort Rotterdam mampu mendorong budaya politik yang inklusif?**

Dalam konteks Kota Makassar, jalan raya umumnya menjadi pilihan utama sebagai ruang publik fisik bagi mahasiswa untuk melakukan aksi unjuk rasa. Faktor-faktor seperti lokasi yang strategis, aksesibilitas, dan daya tarik visual menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan lokasi tersebut. [6].

Kajian Penelitian Terdahulu:

1. Artikel “Public Spaces, Urban” oleh [7]

Artikel ini mengkaji peran kompleks ruang publik di kota, menyoroti ketegangan antara penggunaannya sebagai platform untuk ekspresi sosial dan politik dan perannya dalam mempromosikan citra kota dan pertumbuhan ekonomi. Artikel ini menantang pandangan tradisional tentang ruang publik sebagai tempat untuk bersantai dan konsumsi. Penulis berpendapat bahwa ruang-ruang ini secara historis berfungsi sebagai arena vital untuk wacana publik, protes, dan gerakan sosial. Namun, tren kontemporer dalam perencanaan dan pengelolaan perkotaan sering kali memprioritaskan komersialisasi dan kontrol ruang publik, yang mengarah pada pembatasan aktivitas yang dianggap mengganggu citra kota yang diinginkan.

2. Artikel "Defying Disappearance: Cosmopolitan Public Spaces in Hong Kong" [8]:

Artikel ini mengeksplorasi hubungan kompleks antara ruang publik dan politik budaya di Hong Kong. Ini menantang persepsi umum bahwa ruang publik di kota menghilang karena faktor-faktor seperti kontrol berlebihan atau komersialisasi. Sementara sentimen ini beresonansi dengan kekhawatiran yang diungkapkan di banyak kota, penulis berpendapat bahwa di Hong Kong, kecemasan ini terkait dengan politik pasca-kolonial.

3. Artikel "Introduction: Contested Landscapes, Asian Cities" [9] :

membahas konsep lanskap sebagai ruang yang diperebutkan di kota-kota Asia. Para penulis berpendapat bahwa lanskap bukan hanya lingkungan fisik tetapi juga dibentuk oleh faktor budaya, sosial, dan politik. Mereka menekankan pentingnya mengenali beragam perspektif dan pengalaman yang berkontribusi pada pembentukan lanskap perkotaan.

Penelitian sebelumnya mengenai ruang publik perkotaan dan budaya politik telah dilakukan di berbagai konteks, namun, konteks spesifik Kota Makassar masih memerlukan penelitian yang mendalam. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa karakteristik fisik dan sosial suatu ruang publik dapat mempengaruhi partisipasi politik dan konstruksi identitas kota. Faktor-faktor ini saling terkait dan mengarahkan dan membentuk dalam realitas kota.

Meskipun memiliki potensi besar, ruang publik di kota Makassar sering menghadapi tantangan seperti kurangnya aksesibilitas, desain yang kurang inklusif, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Berdasarkan kajian sebelumnya, desain ruang publik yang inklusif dapat meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat demokrasi lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana ruang publik di kota Makassar dapat berfungsi sebagai katalisator bagi budaya politik inklusif.

Landasan Teori

Konsep atau Teori yang Relevan:

1. Teori Ruang Publik oleh [1] yang menekankan pentingnya ruang yang dirancang untuk manusia.
2. Konsep Demokrasi Deliberatif dari [5], [10] yang menghubungkan ruang publik dengan diskursus rasional.
3. Teori Keberlanjutan Urban oleh [3] yang menyoroti integrasi antara desain fisik dan fungsi sosial ruang publik.

Variabel Penelitian

- A. Ruang Publik Perkotaan, mencakup: Desain Fisik, Fungsi Sosial, Fasilitas Pendukung, Aksesibilitas, Keamanan dan Kenyamanan, Regulasi dan Kebijakan.
- B. Budaya Politik Inklusif, mencakup: Keterlibatan Politik Lintas Kelompok, Kesetaraan Akses Ekspresi Politik, Representasi dan Kebebasan Berpendapat, Kolaborasi Warga dan Pemerintah, Rasa Aman dan Inklusif.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif [11] dengan pendekatan studi kasus [12]. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 15 informan dari berbagai kelompok sosial (aktivis, pedagang kaki lima, mahasiswa, tokoh masyarakat), observasi langsung di tiga lokasi utama (Pantai Losari, Karebosi, dan Fort Rotterdam), serta survey [13] dokumentasi kebijakan dan media lokal. Analisis data dilakukan dengan NVivo [11] menggunakan teknik coding tematik untuk menemukan pola dan hubungan antara tema, untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang Peran Ruang Publik Perkotaan dalam Mendorong Budaya Politik Inklusif di Kota Makassar. Kesimpulannya ditemukan bahwa desain fisik, aksesibilitas, fungsi sosial, serta regulasi yang mengatur ruang publik sangat memengaruhi sejauh mana warga dari berbagai kelompok sosial dapat berpartisipasi dalam aktivitas politik.

Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus; dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam [14] tentang Peran Ruang Publik Perkotaan dalam Mendorong Budaya Politik Inklusif di Kota Makassar. Studi kasus tersebut untuk mengeksplorasi konteks dan dinamika yang spesifik dalam lingkungan/kawasan kota.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pantai Losari merupakan ikon Kota Makassar yang memiliki daya tarik tinggi sebagai ruang publik tepi laut. Kawasan ini terbuka 24 jam dan menjadi tempat berkumpul masyarakat untuk aktivitas rekreasi, olahraga, hingga diskusi informal. Namun, dari hasil observasi ditemukan bahwa fasilitas pendukung seperti tempat duduk kelompok, toilet umum, dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas masih terbatas. Kegiatan sosial-politik di area ini lebih banyak bersifat spontan dan tidak terorganisasi.

Lapangan Karebosi adalah alun-alun utama kota yang sering digunakan untuk kegiatan olahraga, konser, bazar, dan juga kampanye politik. Kawasan ini memiliki peran penting sebagai titik temu sosial warga lintas kelas dan usia. Tersedia ruang terbuka luas, tetapi kurangnya tempat berlindung dari panas/hujan menjadi hambatan bagi aktivitas diskusi publik. Interaksi sosial di Karebosi tergolong aktif dan intensif, khususnya pada akhir pekan.

Benteng Fort Rotterdam adalah ruang publik bersejarah yang kini difungsikan sebagai situs wisata budaya sekaligus tempat berkegiatan komunitas. Area ini digunakan oleh kelompok seni, pegiat sejarah, dan aktivis sosial

untuk diskusi, pementasan seni, hingga forum warga. Ruang ini relatif tertata dan aman, namun akses publik terkadang terbatas pada jam operasional dan kegiatan tertentu.

Dari ketiga lokasi tersebut, dapat ditarik gambaran bahwa meskipun masing-masing memiliki karakteristik berbeda, seluruhnya memainkan peran dalam membentuk interaksi sosial yang berkontribusi pada budaya politik lokal. Analisis menggunakan perangkat lunak NVivo untuk mendalami bagaimana keterlibatan budaya politik inklusif dan ekspresi warga termanifestasi di ruang-ruang publik tersebut.

A. Hasil analisis NVivo menghasilkan lima tema dominan:

3.1 Aksesibilitas Fisik dan Keadilan Spasial Sebagian besar informan menyatakan bahwa ruang publik belum sepenuhnya dapat diakses oleh semua kalangan. Kode NVivo seperti akses terbatas, jalan rusak, dan minim fasilitas muncul berulang. Masyarakat disabilitas dan warga usia lanjut merasa terpinggirkan dari ruang publik utama.

3.2 Interaksi Sosial sebagai Modal Politik Teridentifikasi bahwa ruang publik mendukung percakapan dan diskusi tentang isu-isu politik lokal secara informal. Kode seperti ngobrol politik, diskusi santai, dan acara komunitas menunjukkan bahwa ruang publik memainkan peran sebagai arena politik warga.

3.3 Ruang Ekspresi dan Representasi Kelompok Marginal Ruang publik seperti Fort Rotterdam menjadi tempat pertemuan komunitas budaya, LSM, dan aktivis perempuan. Kode unjuk rasa damai, panggung seni komunitas, dan aspirasi perempuan mengindikasikan bahwa ruang publik memberi tempat bagi kelompok marginal untuk menyuarakan kepentingan mereka.

3.4 Hambatan Regulatif dan Ketidaksiapan Institusional Dari dokumen yang dikaji dan wawancara dengan pengelola ruang publik, ditemukan bahwa kebijakan pemerintah kota belum responsif terhadap pentingnya ruang publik sebagai wahana demokrasi. Kode tidak boleh berkumpul, perizinan rumit, dan ketakutan dibubarkan mendominasi.

3.5 Peran Komunitas Lokal dan Kolaborasi Pemerintah Data menunjukkan bahwa inisiatif komunitas sangat menentukan dalam menghidupkan ruang publik. Di sisi lain, peran pemerintah masih bersifat pasif. Kode seperti inisiatif warga, kerjasama dengan RT/RW, dan kegiatan mandiri menunjukkan kekuatan inisiatif akar rumput.

B. Pembahasan

Temuan menunjukkan bahwa ruang publik di Kota Makassar memiliki potensi besar sebagai platform budaya politik inklusif. Namun, potensi ini tidak sepenuhnya dimaksimalkan akibat hambatan regulasi dan kurangnya desain yang berkeadilan. Hal ini tercermin secara jelas dalam bagan visual hasil tematik yang menunjukkan bahwa tema “**Aksesibilitas Fisik dan Keadilan Spasial**” merupakan yang paling dominan (kode 28, pada Gambar 1), disusul oleh “Interaksi Sosial sebagai Modal Politik” dan “Hambatan Regulatif dan Institusional”. Kuatnya temuan ini menandakan bahwa isu keadilan spasial dan pengelolaan yang inklusif merupakan perhatian utama warga dalam menggunakan ruang publik secara politis.

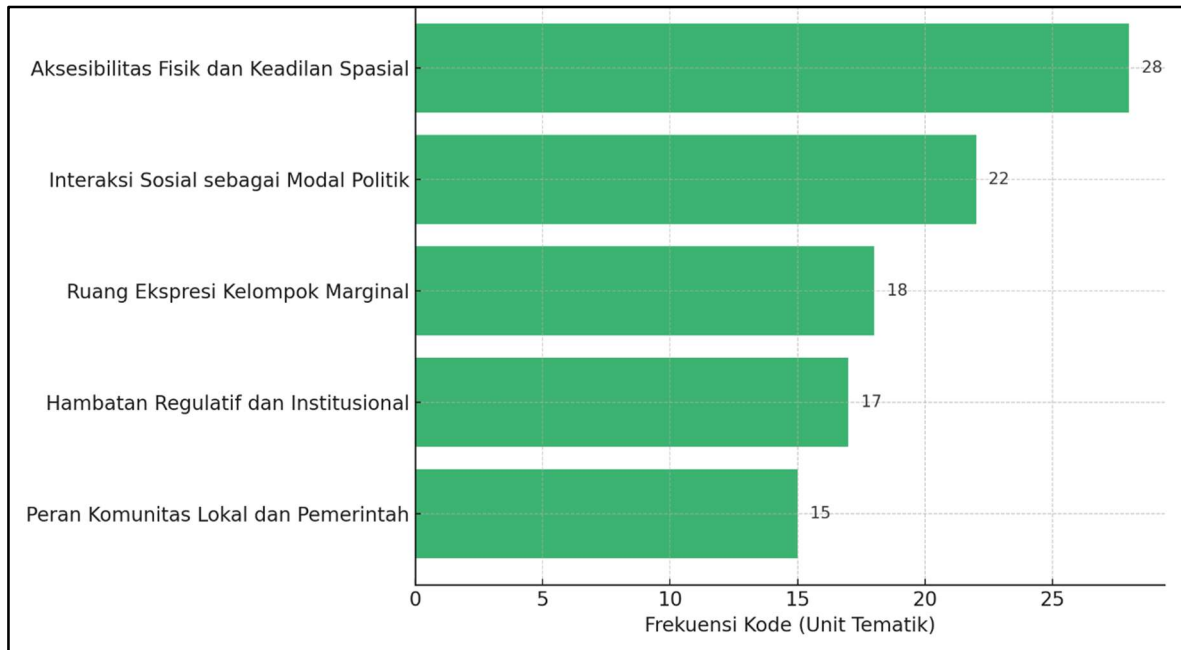
Visualisasi berbasis kata (*word cloud*) yang menonjolkan istilah “aksesibilitas”, “partisipasi”, “politik”, “komunitas”, “ekspresi” dan “diskusi” memperkuat bukti naratif bahwa warga memaknai ruang publik sebagai media interaksi dan ekspresi politik. Dominasi istilah tersebut menunjukkan tingginya kesadaran warga akan pentingnya ruang inklusif yang dapat mengakomodasi berbagai bentuk partisipasi politik non-formal.

Prinsip “hak atas kota” sebagaimana dalam teori Gehl [1] dan Thompson [3] menjadi penting dalam pembahasan ini. Mereka menekankan bahwa ruang kota harus memberikan kesempatan setara bagi seluruh warga untuk menggunakan dan membentuknya, termasuk dalam konteks politik. Desain ruang yang tidak adil atau eksklusif akan membatasi ekspresi politik kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, dan komunitas lokal.

Selain itu, dikaitkan dengan teori ruang diskursif Habermas [5], [10], ruang publik yang bebas dari kontrol negara adalah prasyarat demokrasi deliberatif. Dalam konteks Makassar, temuan seperti perizinan rumit dan pembatasan aktivitas publik di ruang terbuka menunjukkan lemahnya jaminan atas kebebasan berekspresi. Ini menjadi hambatan utama dalam menghidupkan demokrasi yang inklusif dan partisipatif.

Dengan demikian, bagan tematik dan visualisasi berbasis kata (*word cloud*) tidak hanya memperkuat dimensi analitis, tetapi juga memberikan bukti visual yang mendukung keterkaitan antara ruang publik dan penguatan budaya politik warga. Keduanya saling melengkapi dalam mengilustrasikan gap antara potensi ruang publik sebagai wahana demokrasi dengan kenyataan regulatif dan desain yang belum inklusif sepenuhnya. Dimana pendekatan desain inklusif berfokus pada penciptaan ruang fungsional yang dapat dengan layak melayani semua pengguna, termasuk kelompok terpinggirkan dan ataupun rentan tersebut [15].

Adapun visualisasi bagan hasil tematik dan berbasis kata (*word cloud*) dapat dilihat pada gambar 1 dan 2 sebagai berikut:



(Sumber: Penulis, 2025)

Gambar 1. Bagan visual hasil tematik

Bagan tersebut menunjukkan lima tema utama yang muncul dari hasil *coding tematik* dalam penelitian. Panjang batang menunjukkan frekuensi kemunculan unit data (kutipan wawancara dan/atau catatan lapangan) yang terkait dengan masing-masing tema.



(Sumber: Penulis, 2025)

Gambar 2. Visualisasi berbasis kata (*word cloud*)

Hal ini mengindikasikan bahwa kata-kata aksesibilitas, diskusi/interaksi, komunitas, dan partisipasi mendominasi, menunjukkan topik-topik utama yang sering muncul dalam narasi warga terkait ruang publik dan budaya politik di Kota Makassar.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ruang publik di Kota Makassar memiliki peran krusial dalam membentuk budaya politik yang inklusif. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis tematik, ditemukan lima tema utama yang menggambarkan dinamika antara ruang publik dan partisipasi politik masyarakat. Tema dominan mencakup aksesibilitas fisik dan keadilan spasial, interaksi sosial sebagai modal politik, ruang ekspresi kelompok marginal, hambatan regulatif dan institusional, serta peran komunitas lokal dan pemerintah.

Tiga lokasi utama; Pantai Losari, Lapangan Karebosi, dan Fort Rotterdam, mewakili variasi karakteristik ruang publik di Kota Makassar. Meskipun memiliki potensi untuk mendorong keterlibatan warga lintas kelompok, masing-masing lokasi masih menghadapi tantangan dari sisi desain, pengelolaan, dan regulasi.

Hasil *word cloud* dan analisis tematik memperkuat bahwa warga menginginkan ruang publik yang terbuka, aman, dan adil sebagai sarana menyalurkan aspirasi serta membangun kesadaran politik kolektif. Ruang publik bukan hanya fasilitas fisik, tetapi juga ruang sosial yang mewujudkan prinsip-prinsip keadilan, inklusivitas, dan kebebasan.

5. REKOMENDASI

Ruang publik di Kota Makassar belum sepenuhnya inklusif, namun memiliki potensi besar untuk mendorong budaya politik partisipatif. Penelitian ini merekomendasikan:

1. Revisi kebijakan ruang publik yang menghambat kebebasan berekspresi.
2. Perancangan ruang publik perkotaan dengan prinsip universal desain, dimana bertujuan untuk menciptakan lingkungan inklusif yang memenuhi beragam kebutuhan pengguna, termasuk penyandang disabilitas, orang tua, dan anak-anak [16], [17]
3. Penguatan kolaborasi antara komunitas warga dan pemerintah kota.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ruang publik di Kota Makassar dapat menjadi lebih inklusif dan mendorong keterlibatan aktif warga dalam proses politik, sehingga tercipta budaya politik yang sehat dan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] J. Gehl, *Life Between Buildings (Using Public Space)*. Washington DC, USA: Island Press, 2011.
- [2] S. Carr, M. Francis, L. G. Rivlin, and A. M. Stone, *Public Space (Environment and Behavior Series)*, First Published. United States of America: Cambridge University Press, 1992.
- [3] C. W. Thompson, "Urban open space in the 21st century," *Landsc Urban Plan*, vol. 60, no. 2, pp. 59–72, Jul. 2002, doi: 10.1016/S0169-2046(02)00059-2.
- [4] N. Fitriyah, "BAB 9: RUANG PUBLIK DAN PARTISIPASI WARGA DI TAMAN KOTA," in *SOSIOLOGI RUANG PUBLIK PERKOTAAN*, Ahmadin, Ed., Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2023.
- [5] J. Habermas, *The Liberating Power of Symbols, Philosophical essays*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2001. Accessed: Jan. 17, 2024. [Online]. Available: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=F8N6pu6ECIgC&oi=fnd&pg=PP8&dq=Habermas,+J%C3%BCrgen.+2001.+The+Liberating+Power+of+Symbols,+Philosophical+essays,.+Polity+Press,+Cambridge.+Held,+David.+1980&ots=hr91bUVUeQ&sig=ki4MOvLVdH4GIV325aOt2AZvOOI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- [6] A. Purnamasari S and L. Muta'ali, "KAJIAN SPASIAL RUANG PUBLIK (PUBLIC SPACE) PERKOTAAN UNTUK AKTIVITAS DEMONSTRASI MAHASISWA DI KOTA MAKASSAR ,," *Jurnal Bumi Indonesia*, pp. 27–36, 2012, Accessed: Jan. 16, 2024. [Online]. Available: <https://www.neliti.com/id/publications/75659/kajian-spasial-ruang-publik-public-space-perkotaan-untuk-aktivitas-demonstrasi-m>
- [7] D. Collins and B.-M. Shantz, "Public Spaces, Urban," in *International Encyclopedia of Human Geography*, Elsevier, 2009, pp. 517–522. doi: 10.1016/B978-008044910-4.01099-3.
- [8] L. Law, "Defying Disappearance: Cosmopolitan Public Spaces in Hong Kong," *Urban Studies*, vol. 39, no. 9, pp. 1625–1645, Aug. 2002, doi: 10.1080/00420980220151691.

- [9] L. Kong and L. Law, "Introduction : Contested Landscapes, Asian Cities," *Urban Studies*, vol. 39, no. 9, pp. 1503–1512, Aug. 2002, doi: 10.1080/00420980220151628.
- [10] J. Habermas, *Communication and The Evolution of Society*. Bosto: Beacon Press, 1979. Accessed: Jan. 17, 2024. [Online]. Available: <https://contemporarythinkers.org/jurgen-habermas/books/>
- [11] B. Miles Matthew and Huberman Michael, "Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman etc.)," 2014.
- [12] R. K. . Yin, *Case study research : design and methods*. Sage Publications, 2009.
- [13] Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2012.
- [14] Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- [15] R. B. Shalihah and I. Pujiyanti, "Perancangan Community Learning Center Dengan Pendekatan Inclusive Design di Yogyakarta," *JAS: Journal of Architecture Students*, vol. 2, no. 2, pp. 74–90, Nov. 2021, doi: 10.31101/jas.v2i2.2097.
- [16] B. Yılmaz Çakmak and H. F. Alkan Meşhur, "Universal Design in Urban Public Spaces: The Case of Zafer Pedestrian Zone / Konya -Turkey," *Iconarp International J. of Architecture and Planning*, vol. 6, no. Special Issue, pp. 15–40, Aug. 2018, doi: 10.15320/ICONARP.2018.47.
- [17] E. Esfandfard, M. H. Wahab, and R. Che Amat, "UNIVERSAL DESIGN IN URBAN PUBLIC SPACES FOR PEOPLE WITH DISABILITY. CASE STUDY OF TEHRAN, IRAN," *PLANNING MALAYSIA JOURNAL*, vol. 16, no. 5, Jul. 2018, doi: 10.21837/pmjournal.v16.i5.421.